

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan (Wastam Wahyu Hidayat, 2018). Laporan keuangan yang dapat disediakan oleh perusahaan terdiri dari beberapa bentuk diantaranya laporan neraca, laba rugi, arus kas, dan laba ditahan. Di antara berbagai laporan keuangan tersebut, laporan neraca dan laba rugi merupakan laporan keuangann pokok dan sisanya merupakan laporan tambahan (Mokhamad Anwar, 2019). Adapun menurut SAK No.1 tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (Irmah Halimah Bachtiar dan Nurfadila, 2019:79). Laporan keuangan sebuah perusahaan yang seharusnya disusun sesuai dengan standar akuntansi justru dimanipulasi dengan memanfaatkan berbagai metode dan prosedur yang tercakup dalam standar itu sendiri (Sri Sulistyanto: 116). Oleh sebab itu, sebuah perusahaan atau entitas perlu memperhatikan kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan adalah persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut (Fadillah Amin, 2019). Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik yaitu: dapat dipahami (kualitas informasi yang ditampilkan dalam

laporan keuangan mudah dipahami oleh pemakai), relevan (informasi yang dapat membantu pemakai dalam mengevaluasi atau mengoreksi hasil evaluasi), keandalan (menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi), dan dapat dibandingkan (Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini, 2014:16).

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). Namun sampai saat ini, beberapa perusahaan belum mengimplementasikan GCG dengan baik dan belum memenuhi indikator diantaranya Jiwasraya (JS) yaitu Kejaksaan Agung menemukan potensi kerugian negara per Agustus 2019 sebesar Rp 13,7 triliun akibat pengelolaan dana investasi produk JS Saving Plan milik Asuransi Jiwasraya. Diduga, sebanyak 13 perusahaan ikut terseret dalam kasus tersebut dan melanggar prinsip *good corporate governance* (GCG). Potensi kerugian tersebut timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola, yakni terkait pengelolaan dana yang dihimpun dalam program JS Saving Plan. Perseroan banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan yang juga tinggi, baik itu keuntungan tinggi antara lain, penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial hingga adanya laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Jiwasraya dan penyalahgunaan kewenangan. Tata kelola ini berdampak pada penempatan investasi oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang tidak baik sehingga berujung pada masalah keuangan. (Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Jiwasraya masih rendah dikarenakan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang disebabkan interpretasi data yang salah dikarenakan

laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan fakta, sehingga informasi yang dihasilkan laporan keuangan tersebut tidak *transparency*, *responsibility*, *accountability*, ketidak andalan serta tidak dapat dipahami.

Selanjutnya, kasus BPJS Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit setiap tahunnya sehingga pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100% pada 1 Januari 2020. Disamping lain BPJS Kesehatan belum memberikan laporan keuangan tahun 2018 padahal hal ini bagian dari pertanggungjawaban publik. Dokumen laporan pengelolaan dana jaminan sosial mereka unggah terakhir adalah tahun 2017. Rendahnya transparansi tersebut yang menyebabkan masyarakat jadi tak mengetahui permasalahan yang terjadi pada BPJS Kesehatan (Fadli Zon, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan BPJS masih rendah dikarenakan belum memberikan laporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan laporan keuangan tersebut tidak dapat dipahami, transparan (*transparency*). Sedangkan menurut Riska Franita (2018) prinsip-prinsip *good corporate governance* diantaranya: akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*indenpedency*). Dan menurut I Putu Jati Arsana (2016:392), prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. *Good corporate governance* menurut Cadbury Report adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan

pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya (Muhamad Sadi Is, 2016).

Selain *good corporate governance*, ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu (Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman, 2017:15). Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Mulyono, 2018:106). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu Kantor Akuntan publik (KAP) dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya secara signifikan dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan (Anto Prabowo, 2018). Dari kondisi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan tersebut belum memenuhi indikator ketidakandalan dan tidak dapat dipahami. Dalam penyusunan laporan keuangan juga memerlukan sumber daya manusia yang bersertifikasi atau berkompeten yang menguasai akuntansi (Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu Sofiati, 2017:37) dengan memiliki keterampilan dan pengetahuan sehingga bisa memberikan opini sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dapat meminimalisir kerugian bagi perusahaan.

Disamping lain laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas secara wajar sesuai data dan fakta tanpa ada kesalahan.

Selain itu, fenomena yang terjadi di BPJS Kesehatan yaitu selama ini jumlah kemiskinan terus turun namun peserta BPJS Kesehatan yang menikmati fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus bertambah. Hal ini dikarenakan manajemen dan perhitungan BPJS Kesehatan tidak dilakukan dengan baik. Sehingga defisit BPJS Kesehatan yang semakin membengkak setiap tahun padahal selama ini Pemerintah telah menanggung lebih dari 150 juta masyarakat yang masuk dalam PBI pemerintah pusat sebanyak 96 juta dan PBI Pemerintah Daerah sebanyak 37 juta jiwa serta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau masyarakat biasa yang bukan pegawai pemerintah sebanyak 17 juta jiwa. Selain menanggung pembayaran tersebut, pemerintah juga masih terus menyuntikkan anggaran ke BPJS Kesehatan untuk menutupi defisitnya. Namun, hal ini tidak bisa terus dilakukan sehingga perbaikan design harus dilakukan (Sri Mulyani Indrawati, 2019). Dari kondisi tersebut dikatakan bahwa kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang berkompeten yang memiliki keterampilan yang baik dalam pengolahan data sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang tidak andal yang merugikan perusahaan.

Selanjutnya kasus yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya yaitu Manajemen Asuransi Jiwasraya mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar). Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya. Akibat kesalahan dalam pengelolaan dan penempatan

investasi, Jiwasraya mengalami kekurangan solvabilitas (kemampuan membayar kewajiban) hingga Rp 28 triliun. Jiwasraya terlalu berani menjanjikan return tinggi kepada para nasabah. Dengan menjanjikan return dua kali lebih besar dari deposito, Jiwasraya dipaksa mencari produk-produk dengan return tinggi (Hotbonar, 2020). Dari kondisi tersebut dikatakan bahwa kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang berkompeten yang memiliki pengetahuan yang baik dalam pengolahan dan penempatan investasi sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang tidak relevan dan tidak andal yang merugikan perusahaan.

Masalah kompetensi sumber daya manusia menjadi tantangan setiap pegawai khususnya bidang keuangan. Fenomena yang dijumpai masih ditemukan kesenjangan antara kompetensi sebagai syarat tugas pokok dengan kompetensi yang dimiliki pegawai. Harus diakui masih ada permasalahan yang terjadi dimana staf pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan masih kurang memiliki keterampilan dalam bidang akuntansi (Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman, 2017:16). Sedangkan Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelola keuangan menjamin meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, 2018). Hal ini terbukti bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk akuntansi sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas (Windiyastuti, 2013). Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu dan berkualitas (Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman,

2017:15). Komponen kompetensi sumber daya manusia diantaranya: pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang bisa didapatkan datanya dari proses perekrutan, pelatihan dan penilaian saat bekerja (Ketut Witara, 2018).

Perusahaan yang mengimplementasikan GCG dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Miranda Miryam Maramis, Jenny Morasa, & Heince R.N Wokas, 2018), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan (Rinka Merantika dan Randy Heriyanto, 2017).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Dipengaruhi oleh Implementasi *Good Corporate Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan tidak dapat dipahami, tidak andal dan tidak relevan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

2. *Good corporate governance* belum berjalan dengan baik dan belum memenuhi indikator transparan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*) pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).
3. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung aktivitas perusahaan dalam tata kelola penyusunan laporan keuangan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumukan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Kota Bandung.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mencapai sasaran yang ditentukan, maka diperlukan sebuah pembatasan masalah atau ruang lingkup kajian, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, keterbatasan ini dikarenakan survey lapangan belum bisa dilakukan disebabkan ada wabah Covid-19.
2. Sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai yang berkaitan dalam pengelolaan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3. Jumlah responden dalam penelitian ini hanya 50 orang di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kota Bandung, keterbatasan ini karena ada wabah Covid-19.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan akademis

Secara akademis penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman dalam pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh secara teori dilapangan.
2. Bagi peneliti lain diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu karya penelitian yang baru dalam pengembangan teknologi informasi.